

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI
PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN
KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)
DI KOTA PADANG PANJANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Negara



Oleh :

**MUNTAHA MARDHATILLAH
12946/2009**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

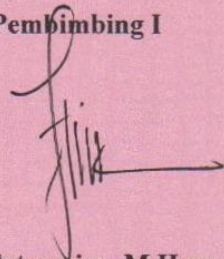
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Padang Panjang
Nama : Muntaha Mardhatillah
TM/NIM : 2009/12946
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 25 Juli 2013

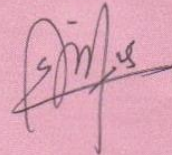
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Fatmariza, M.Hum
NIP. 19660304 199103 2 001

Pembimbing II



Dra. Al Rafni, M.Si
NIP. 19680212 199303 2 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

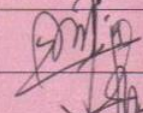
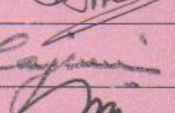
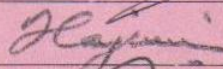
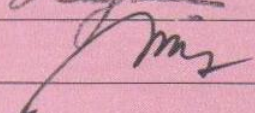
Pada hari Kamis 25 Juli 2013 pukul 11.00 s/d 13.00 WIB

Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Padang Panjang

Nama : Muntaha Mardhatillah
TM/NIM : 2009/12946
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

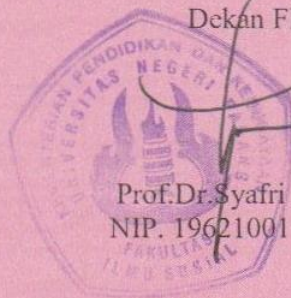
Padang, 25 Juli 2013

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Fatmariza, M. Hum	
Sekretaris	: Dra. Al Rafni, M.Si	
Anggota	: Dr. Hj. Maria Montessori, M.Ed., M.Si	
Anggota	: Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si	
Anggota	: Afriva Khaidir, MAPA.Ph.D	

Mengesahkan:

Dekan FIS UNP



Prof.Dr.Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

ABSTRAK

Muntaha Mardhatillah, 12946/2009 : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) DI KOTA PADANG PANJANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera di Kota Padang Panjang, mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui serta mengetahui upaya yang ditempuh dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum semuanya masyarakat dari golongan miskin yang diikutsertakan, usaha dilakukan tidak secara kolektif, kurangnya partisipasi dari kelompok keluarga sejahtera III plus untuk mau bertindak sebagai bapak angkat, jumlah modal yang diberikan pemerintah kurang mencukupi dalam penyelenggaraan kegiatan UPPKS dan modal yang sering di salah gunakan untuk keperluan konsumtif.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, karena penelitian memberikan gambaran tentang keadaan sebagaimana mestinya. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan dilakukan melalui triangulasi sumber. Kemudian teknik analisa data yang digunakan dapat dikelompokkan dalam 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program UPPKS telah sesuai dengan prosedur yang ada namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dengan masih ditemukannya kendala dalam pelaksanaan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program UPPKS di Kota Padang Panjang dapat dikategorikan kedalam dua bentuk yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal diantaranya : lemahnya pengawasan terhadap program, kurangnya modal yang bersumber dari pemerintah, pembinaan yang belum merata. Dan kendala eksternal diantaranya : pemanfaatan dana bantuan yang belum maksimal, kurangnya kreatifitas dan inovasi beberapa kelompok dalam mencari dan memanfaatkan sumber dana, keterlambatan pengembalian pinjaman. Untuk mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan program UPPKS, dilakukan upaya antara lain mengikut sertakan keluarga sejahtera III bertindak sebagai bapak angkat dalam kelompok, melakukan pembinaan, dan kendala yang bersumber dari peserta program dilakukan upaya seperti pembimbingan mengenai tujuan sebenarnya program UPPKS ini, melakukan sistem jemput bola terhadap anggota yang macet dalam pembayaran.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di Kota Padang Panjang.”

Shalawat dan salam peneliti hadiahkan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata satu (S1) program studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Al Rafni, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan, masukan dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu melayani konsultasi disaat penulis membutuhkan bantuan beliau dalam urusan perkuliahan, selanjutnya rasa terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Fachri Adnan, M.Si.,Ph.d dan Ibu Henni Muchtar, SH.MH selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik.

3. Ibu Dra. Hj. Maria Montesori, M. Ed., M.Si, Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si , dan Bapak Afriva Khaidir, MAPA.Ph.D selaku tim penguji yang telah memberikan masukan sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih sempurna.
4. Ibu Alia Azmi, S.IP., M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menjalankan perkuliahan.
5. Ibu Tismaria, S.E., M.Si selaku Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.
6. Ibu Netti Herawati, S.H., M.M selaku Kepala Tata Usaha Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.
7. Ibu Rini Lisdayani, S.Sos., M.Si selaku Kepala Tata Usaha Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Padang Panjang yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.
8. Ibu Ema Suryani, A.Md selaku sekretaris dari Asosiasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (AKU) Kota Padang Panjang yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.
9. Ibu Nursyamsu, BAC selaku Staf Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.

10. Para masyarakat peserta program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera di Kota Padang Panjang yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.
11. Teristimewa kedua orang tua tercinta, Alm. Drs. M. Taher Hanif, M.A dan Nirwana Murni S,Kar, M.Pd, serta kakak Mutia Kahanna S.Pd juga keluarga yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis secara moral maupun material serta doa untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan terutama bagi rekan-rekan IAN 2009 yang telah memberikan masukan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua bimbingan, bantuan, masukan, kritikan, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dari penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua.

Padang, Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Foto	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Mamfaat Penelitian	12

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis	14
1. Pemberdayaan Msayarakat.....	14
2. kemiskinan	18
3. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin	29
4. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	33
B. Kerangka Konseptual	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Informan Penelitian	41
D. Jenis,sumber, teknik, dan alat pengumpul data	43
E. Teknik Pengujian Keabsahan Data	47
F. Teknik Analisis Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum.....	51
1. Kondisi Geografis Kota Padang Panjang.....	51
2. Penduduk dan Angkatan Kerja Kota Padang Panjang.....	52
3. Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Padang Panjang.....	54
4. Sejarah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang	57
5. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang.....	59
B. Temuan Khusus.....	67
1. Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Padang Panjang.....	67
2. Kendala Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Padang Panjang.....	84

3. Upaya Dalam Mengatasi Kendala yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Padang Panjang	90
C. Analisis dan Pembahasan	93
1. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	93
2. Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Padang Panjang	95
3. Kendala Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Padang Panjang.....	97
4. Upaya Dalam Mengatasi Kendala yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Padang Panjang	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. saran	105

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Keluarga Miskin Kota Padang Panjang	2
Tabel 1.2 Daftar kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Padang panjang	6
Tabel 1.3 Kelompok UPPKS “Flamboyan”	8
Bagan 2.1 Kerangka Konseptual.....	39
Tabel 3.1 Jenis, teknik dan alat pengumpul data	47
Grafik 4.1 Penduduk Kota Padang Panjang Menurut Tingkat Pendidikan.....	57
Bagan 4.2 Struktur organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang	63
Tabel 4.3 Pencapaian peserta KB Kota Padang Panjang	76
Tabel 4.4 Kelompok UPPKS yang Menunggak Dalam Pengembalian Pinjaman	88

DAFTAR FOTO

Foto 1 Usaha jualan yang dijalankan oleh Kelompok UPPKS Melati I	80
Foto 2 Usaha makanan ringan yang dijalankan oleh Kelompok UPPKS Lidah Buaya.....	81
Foto 3 Usaha Bordiran yang dijalankan oleh Kelompok UPPKS Garuda IV .	82
Foto 4 Usaha petani bunga yang dilakukan oleh Kelompok UPPKS Gumala I	83
Foto 5 Usaha kue kering yang dijalankan Kelompok UPPKS Fadhillah.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan negara-negara berkembang di dunia. Kemiskinan seringkali dipahami dengan rendahnya tingkat kesejahteraan semata, padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Salah satu negara yang masih dibelit kemiskinan ini adalah Indonesia. Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan ukuran kehidupan kelompoknya, dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2010: 320).

Begitu juga dengan kota Padang Panjang yang tidak luput dari masalah kemiskinan, Padang Panjang merupakan salah satu kota terkecil yang berada di wilayah Propinsi Sumatera Barat. Padang Panjang mempunyai luas 2.300 Ha atau sekitar 0,05 persen dari luas Sumatera Barat. Kota Padang Panjang terdiri dari dua kecamatan yaitu Padang Panjang Barat dengan luas daerah 975 Ha dan Padang Panjang Timur dengan luas 1.325 Ha. Dari kedua kecamatan tersebut masing-masing memiliki delapan kelurahan. Berarti Kota Padang Panjang memiliki 16 kelurahan. (Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2012)

Untuk lebih jelasnya kondisi kemiskinan di Padang Panjang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1

Rekapitulasi Keluarga Miskin Kota Padang Panjang Hasil Survei Tahun 2012

No	Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga Miskin (KK)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Ganting	96	404
2	Sigando	49	225
3	Ekor Lubuk	136	576
4	Ngalau	102	404
5	Tanah Pak Lambik	42	162
6	Guguk Malintang	128	521
7	Koto Panjang	151	613
8	Koto Katik	55	196
9	Silaing Bawah	122	526
10	Silaing Atas	71	260
11	Pasar Usang	99	401
12	Pasar Baru	48	213
13	Balai-Balai	126	547
14	Tanah Hitam	145	596
15	Kampung Manggis	128	540
16	Bukit Surungan	71	364
	Total	1569	6548

Sumber : Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang, 2012.

Tabel diatas menggambarkan tingkat kemiskinan yang ada di kota Padang Panjang, Padang Panjang terbagi atas 2 kecamatan yaitu : Kecamatan Padang Panjang Timur dan Kecamatan Padang Panjang Barat yang masing-masingnya dibagi kepada 8 kelurahan, dari 16 kelurahan yang ada terdapat beberapa kantong-kantong kemiskinan yang ada di Kota Padang Panjang, diantaranya kelurahan yang paling banyak penduduk miskinnya terdapat di Kelurahan Koto Panjang dengan 613 jiwa penduduk miskin, selanjutnya Kelurahan Tanah Hitam dengan 596 jiwa penduduk miskin, Kelurahan Ekor Lubuk dengan 576 jiwa penduduk miskin, Kelurahan Balai-balai dengan 547 jiwa penduduk miskin, Kelurahan

Kampung Manggis dengan 540 jiwa penduduk miskin, Kelurahan Silaing Bawah dengan 526 jiwa penduduk miskin, Kelurahan Guguk Malintang dengan 521 jiwa penduduk miskin, dan Kelurahan Ngalau dengan 404 jiwa penduduk miskin.

Data yang didapat dari badan pusat statistik kota Padang Panjang menyatakan jumlah penduduk Padang Panjang pada tahun 2012 adalah sekitar 47.619 jiwa dan yang tercatat sebagai keluarga miskin adalah 6.548 jiwa atau sekitar 14 % dari jumlah penduduk yang ada, dan dari 14% penduduk miskin yang ada terdapat sekitar 268 jiwa penduduk miskin yang berstatus sebagai janda atau sekitar 0,6 %, hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, khususnya dari pemerintah daerah sendiri untuk menanggulangi masalah tersebut.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan tersebut adalah melalui pendekatan pemberdayaan keluarga yang mengacu pada UU No.10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang pelaksanaannya diatur dalam Inpres Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.

Inpres Nomor 3 Tahun 1996 tersebut menekankan perlunya usaha yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk memberikan kemampuan pada keluarga, termasuk keluarga yang masih dalam tahap Pra Sejahtera dan Sejahtera I, agar dapat memanfaatkan berbagai peluang dan dukungan yang ada untuk bangkit dari ketertinggalan dalam bidang sosial dan ekonomi. Upaya ini dilakukan dalam rangka membantu keluarga terutama yang masih berada dalam tahap keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I

agar memiliki wawasan, sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang menjunjung tinggi sifat hemat, perencanaan kedepan dan mampu mengumpulkan modal kerja secara mandiri untuk mengembangkan usahanya.

Di sini BKKBN sebagai penyelenggara pemberdayaan keluarga dari pemerintah membuat sebuah program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dengan membentuk suatu wadah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Tujuan umum dari kelompok UPPKS adalah untuk memberdayakan ibu-ibu/wanita di bidang ekonomi sebagai upaya peningkatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka membangun kemandirian dan ketahanan keluarga serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan kegiatan usaha ekonomi produktif keluarga, terutama kaum ibu dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan keluarga. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dikembangkan melalui pendekatan kelompok dengan penyediaan modal kerja dari berbagai sumber dana yang diberikan pada setiap kelompok. Kelompok ini beranggotakan dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, mulai dari tahapan keluarga Pra Sejahtera sampai kepada Keluarga Sejahtera III Plus (Profil UPPKS 2009).

Sasaran dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ini adalah para keluarga Pra Sejahtera yang beminat dalam melakukan usaha ekonomi keluarga ataupun yang sudah mempunyai usaha. Para keluarga Pra Sejahtera (keluarga kurang mampu) bersama-sama dengan Keluarga Sejahtera III Plus membentuk suatu kelompok yang terdiri dari 10 samapai 20 anggota, dan memilih

kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Pentingnya peranan keluarga dari Keluarga Sejahtera III Plus dimaksudkan untuk dapat membimbing para keluarga dari Keluarga Pra Sejahtera.

Di kota Padang Panjang sendiri, penyelenggaraan UPPKS dilaksanakan oleh kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, hal ini sesuai dengan keputusan walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang menetapkan tugas pokok dan fungsi kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kota Padang Panjang, yaitu salah satunya melakukan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga yang mencakup program pemberdayaan ekonomi keluarga.

Kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kota Padang Panjang sebagai pelaksana dalam program Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) di kota Padang Panjang, juga mengajak para anggota UPPKS untuk mau ikut serta kedalam program keluarga berencana, hal ini juga sejalan dengan tugas pokok dan fungsi kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yaitu salah satunya untuk menyelenggarakan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

UPPKS di kota Padang Panjang sudah didirikan semenjak tahun 1990 yang pada awalnya bernama Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), UPPKA tersebut hanya bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta KB. Namun seiring perkembangannya UPPKA, di ubah menjadi UPPKS

dengan cakupan yang lebih luas yaitu tidak hanya terbatas pada keluarga akseptor KB saja. Sekarang kelompok UPPKS di kota Padang Panjang sudah berjumlah sebanyak 32 kelompok UPPKS yang tersebar di 16 kelurahan yang ada di kota Padang Panjang, jumlah modal yang terkumpul pada tahun 2012 ini adalah sebanyak 187 juta yang berasal dari APBD, bantuan pemda, dana dari BKKBN pusat dan dari BKKBN provinsi (Hasil wawancara dengan Netti Herawati, S.H, M.M , kepala TU kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kota Padang Panjang tanggal 15 Oktober 2012) .

Tabel 1.2

Daftar kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Padang panjang :

No	Lokasi	Nama Kelompok UPPKS
1	Kelurahan Silaing Bawah	Teratai, Flamboyan, Lili Paris
2	Kelurahan Silaing Atas	Mawar Putih
3	Kelurahan Pasar Usang	Melati II, Bunga Lidah Buaya, Anggrek, Mentari
4	Kelurahan Bukit Surungan	Busur I, Busur II
5	Kelurahan Pasar Baru	Sejahtera I, Sejahtera II
6	Kelurahan Balai Balai	Makmur II
7	Kelurahan Tanah Hitam	Sartika, Kartini, Fadhillah
8	Kelurahan Kampung Manggis	Manggis Permai, Restu Ibu
9	Kelurahan Guguk Malintang	Gumala I, Gumala II, Gilang Jaya
10	Kelurahan Koto Panjang	Sabai Nan Aluih, Garuda I, Garuda IV
11	Kelurahan Ngalau	Makmur
12	Kelurahan Ekor Lubuk	Cempaka Putih
13	Kelurahan Tanah Pak Lambik	Dahlia
14	Kelurahan Koto Katik	Merpati Putih
15	Kelurahan Ganting	Flamboyan, Bina Sejahtera
16	Kelurahan Sigando	Amanah I, Amanah II

Sumber : Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencan Kota Padang Panjang, 2012.

Masalah yang ditemui didalam pelaksanaan UPPKS di kota Padang Panjang adalah belum semuanya masyarakat miskin yang ikut serta kedalam program UPPKS ini, padahal jika dilihat pada tabel 1.1 mengenai rekapitulasi masyarakat miskin kota Padang Panjang masih banyak masyarakat miskin yang membutuhkan program ini. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dalam mengenalkan program UPPKS ini kepada masyarakat miskin yang ada di kota Padang Panjang.

Jenis usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota didalam satu kelompok UPPKS juga bermasalah yang mana seharusnya jenis usaha yang dilakukan seragam pada setiap kelompok, hal ini bertujuan untuk menfokuskan perhatian masing-masing anggota kelompok terhadap satu usaha, apabila terjadi kendala-kendala dalam menjalankan usaha, tentu akan lebih mudah diselesaikan dengan bantuan anggota lain dikarenakan memiliki tujuan yang sama untuk memajukan usaha yang dijalankannya sehingga dapat menjalankan usaha tersebut secara kolektif. Nnamun yang ditemui dilapangan yaitu terdapatnya bermacam-macam usaha yang dilakukan oleh anggota UPPKS dalam satu kelompok UPPKS, seperti yang terlihat pada tabel Kelompok UPPKS Flamboyan yang berada di Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat dibawah ini :

Tabel 1.3
Kelompok UPPKS “Flamboyan”

No	Nama	Status KS	Peserta KB	Jenis Usaha	Ket
1	Netrawati	KS III	-	Bordiran	Ketua
2	Lena Sofia	KS II	IUD	Jualan	Bendahara
3	Anatia Rose	KS II	Suntik	Jualan	Sekretaris
4	Deswita Warti	KS I	IUD	Warung Sembako	Anggota
5	Nora	KS II	Suntik	Petani Bunga	Anggota
6	Suarni Jamhur	KS III	-	Petani Bunga	Anggota
7	Efitia	KS III	-	Petani Bunga	Anggota
8	Afrida	KS II	Suntik	Petani Bunga	Anggota
9	Upik	KS II	IUD	Petani Bunga	Anggota
10	Mona	KS I	MOW	Keripik Talas	Anggota
11	Darmazetti	KS III	IUD	Membuat Kue	Anggota
12	Sulasmi	KS II	-	Membuat Kue	Anggota
13	Rina Najmah	KS II	Suntik	Petani Bunga	Anggota
14	Salmia	KS III	IUD	Jualan	Anggota
15	Eva	KS II	Suntik	Jualan	Anggota

Sumber : Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang, 2012.

Pada tabel diatas terdapat berbagai macam jenis usaha yang dilakukan oleh kelompok UPPKS Flamboyan, yaitu seperti : bordiran, berjualan, warung sembako, petani bunga dan pembuat kue, hal ini mengakibatkan anggota dalam menjalankan usahanya mencari keuntungan sendiri-sendiri tanpa adanya kerja sama yang terjalin antar anggota kelompok, kerja sama ini dimaksudkan untuk membawa anggota kelompok lain yang kurang mapu menjalankan usahanya supaya bisa meningkatkan kesejahteraan dirinya maupun keluarganya secara bersama-sama. Tabel 1.3 tentang kelompok UPPKS flamboyan juga mencerminkan kurangnya perhatian dari keluarga KS III (keluarga mampu) untuk ikut serta kedalam keanggotaan UPPKS, pentingnya peranan dari keluarga KSIII

yaitu berperan sebagai bapak angkat atau pembina dalam memajukan kelompok UPPKS yang dibinanya, hal ini berguna untuk membantu keluarga pra-KS dan KS I, baik dalam permodalan, jaringan usaha, maupun keterampilan-keterampilan lainnya dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Masalah lain yang ditemui yaitunya persoalan mengenai permodalan, yang mana jumlah modal yang diberikan pemerintah kepada kelompok UPPKS ini sangat terbatas, tercatat terakhir pemerintah mengeluarkan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 pada tahun 2008. Modal awal yang diberikan pada satu kelompok UPPKS berkisar antara Rp. 2.500.000,00 – Rp. 5.000.000,00 yang dibagi kepada beberapa anggota, masing-masing kelompok UPPKS biasanya beranggotakan 10 - 20 orang anggota, hal ini mempunyai dampak terhadap produksi yang kurang berkualitas dari segi kemasan, sehingga mengurangi daya jual dari produksi yang dihasilkan oleh kelompok UPPKS itu sendiri, belum lagi modal yang diberikan kepada anggota UPPKS seringkali di salah gunakan untuk keperluan konsumtif, yang berakibat pada kurang berkembangnya usaha yang dilakukan oleh anggota UPPKS tersebut.

Selama ini masyarakat yang ikut serta kedalam keanggotaan UPPKS merasa cukup terbantu dengan adanya program UPPKS ini, seperti contoh dalam hal permodalan, yang mana dengan adanya program UPPKS ini masyarakat miskin bisa mendapatkan bantuan modal untuk melakukan usahanya tanpa membutuhkan jaminan sebagai persyaratan dalam memperoleh pinjaman modal. Untuk menghimpun potensi kelompok UPPKS di kota Padang Panjang, yang didukung oleh potensi masyarakat dan perhatian dari pemerintah kota Padang Panjang,

maka telah terbentuk kelembagaan melalui pendirian Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) kota Padang Panjang pada tahun 2006 dan masih aktif sampai sekarang, tercatat berawal dari 25 kelompok yang ada sudah berkembang menjadi 32 kelompok disaat sekarang, AKU juga berusaha untuk membangun jaringan kemitraan antara kelompok UPPKS dengan pelaku ekonomi yang lebih mampu, disamping itu AKU juga berupaya menjadi media informasi tentang pangsa pasar, sumber-sumber modal yang bermanfaat bagi perkembangan kelompok UPPKS dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di Kota Padang Panjang”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Belum semuanya masyarakat dari golongan miskin yang diikutsertakan kedalam program UPPKS.
2. Jenis usaha yang dilakukan beragam membuat usaha dilakukan tidak secara kolektif, yang mana usaha dilakukan sendiri-sendiri.
3. Kendala lain yang dihadapi dalam menjalankan program UPPKS oleh kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana kota Padang Panjang adalah kurangnya partisipasi dari kelompok keluarga sejahtera III plus untuk mau bertindak sebagai bapak angkat dalam kelompok UPPKS ini.

4. Pelaksanaan program UPPKS oleh kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kota Padang Panjang yang masih mengalami kendala dalam hal mendapatkan modal dari pemerintah, yang mana jumlah modal yang diberikan pemerintah kurang mencukupi dalam penyelenggaraan kegiatan UPPKS tersebut.
5. Modal yang sering di salah gunakan menjadi keperluan konsumtif membuat usaha yang dijalankan oleh anggota UPPKS menjadi kurang berkembang.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka, agar penelitian ini lebih terfokus, dalam skripsi ini hanya dibatasi tentang pelaksanaan program UPPKS di kota Padang Panjang, kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program UPPKS, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program UPPKS tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di kota Padang Panjang?
2. Apa saja kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di kota Padang Panjang?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di kota Padang Panjang?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan dari program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di kota Padang Panjang.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di kota Padang Panjang.
3. Untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di kota Padang Panjang.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna :

1. Secara teoritis
 - a) Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam memberi studi pemberdayaan masyarakat

- b) Menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti tentang topik yang sama di kemudian hari di lokasi yang berbeda atau dengan beberapa variabel yang berbeda.

2. Secara praktis

- a) Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah kota Padang Panjang dan instansi pemerintah khususnya kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kota Padang Panjang dalam membuat kebijakan program pemberdayaan masyarakat kota Padang Panjang.
- b) Sebagai bahan informasi kepada masyarakat atas segala hasil yang penulis dapatkan berkenaan dengan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di kota Padang Panjang.
- c) Sebagai persyaratan bagi penulis guna meraih gelar sarjana pada Fakultas Ilmu – ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian pemberdayaan Masyarakat

Memberdayakan orang berarti mendorong mereka menjadi lebih terlibat dalam keputusan dan aktivitas yang mempengaruhi pekerjaan mereka (Smith dalam Wibowo, 2007: 112). Dengan demikian, berarti memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka dapat memberikan gagasan baik dan mempunyai keterampilan mewujudkan gagasannya menjadi realitas.

A. M. W Pranarka dalam Ony (1996: 263) mengemukakan konsep sederhana tentang pemberdayaan masyarakat, yaitu : suatu proses yang berjalan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Konsep dan gerakan pemberdayaan memusatkan perhatian pada kenyataan bahwa manusia ataupun sekelompok manusia dapat mengalami kendala dan hambatan dalam proses aktualisasi eksistensinya.

Menurut Edi Suharto (2005: 58) mengatakan bahwa, “Pemberdayaan menunjuk kepada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan,

bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu cara atau proses yang memberikan orang lain kemampuan dan pengetahuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka agar lebih sejahtera. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Diperlukan perhatian dan keterlibatan yang besar dari aparaturnya pemerintahan serta berbagai pihak terkait agar dapat menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

b. Dimensi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut Karl dalam Sugiarti (2003: 193) dapat dianalisis melalui lima dimensi, yaitu dimensi kesejahteraan, akses atas sumber daya, kesadaran kritis, partisipasi dan control. Gambaran analisis kelima dimensi tersebut secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Dimensi kesejahteraan, secara sederhana variabel tersebut dapat diukur dengan mengetahui terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar, seperti kebutuhan makanan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain;

- 2) Dimensi akses atas sumber daya, variabel tersebut dapat diketahui dengan mengukur akses terhadap modal, produksi, informasi, keterampilan, dan lainnya;
- 3) Dimensi penyadaran atau kesadaran kritis, variabel ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya upaya penyadaran terhadap adanya kesenjangan sosial yang disebabkan factor sosial budaya yang sifatnya bisa diubah;
- 4) Dimensi partisipasi, variabel ini untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan sosial dalam partisipasi yang ditunjuk oleh terwakili atau tidaknya masyarakat dalam wadah atau lembaga-lembaga yang terkesan elit;
- 5) Dimensi kontrol, variabel ini untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antar anggota masyarakat terhadap alokasi kekuasaan pada segala bidang kegiatan. Apabila kelima dimensi tersebut telah terpenuhi oleh masyarakat, dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut telah berdaya.

c. Pemberdayaan perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga

Peranan perempuan dalam pembangunan adalah hak dan kewajiban yang dijalankan oleh perempuan pada status atau kedudukan tertentu dalam pembangunan, baik pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pembangunan dibidang pertahanan keamanan, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui perubahan perilaku peningkatan kesadaran kemampuan dan peran serta keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan rohani, pangan, sandang, pendidikan dan

kesehatan termasuk keluarga berencana. Sedangkan peningkatan kesejahteraan dibidang ekonomi bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat, semangat serta keterampilan ibu-ibu di bidang usaha ekonomi produktif.

Tujuan pemberdayaan perempuan menurut Syarif Makmur (2008: 35) yaitu :

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia perempuan yang mempunyai kemampuan dan kemauan guna kemandirian dengan bakal kepribadian, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Terciptanya gerak langkah yang terpadu harmonis antar sektor dan sub sektor pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan politik, LSM, tokoh dan pemuka masyarakat dan agama dalam upaya proses pembangunan perempuan.
- 3) Mengoptimalkan koordainasi dan keterpaduan dalam pengelolaan pemberdayaan perempuan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- 4) Berkembangnya upaya lembaga pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat dalam pengharus utamakan gender di segala bidang kehidupan.

Human Capital Theory, menekankan bahwa manusia merupakan sumber daya utama dalam upaya meningkatkan taraf hidup dirinya maupun dalam melestarikan dan memanfaatkan lingkungannya. Menurut Roesmidi dan Risyanti (2006: 111) pemberdayaan perempuan seringkali digunakan dalam konteks

kemampuan meningkatkan keadaan ekonomi (pemenuhan kebutuhan praktis) individu, yang merupakan prasyarat pemberdayaan. Definisi tersebut mencerminkan bahwa proses pemberdayaan perempuan merupakan tindakan usaha perbaikan atau peningkatan ekonomi, sosial budaya, politik dan psikologi baik secara individual maupun kolektif yang berbeda menurut kelompok etnik dan kelas sosial.

2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan ukuran kehidupan kelompoknya, dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2010: 320).

Badan pusat statistik menetapkan garis kemiskinan berdasarkan tingkat kecukupan konsumsi kalori yaitu 2.100 kalori perkapita per hari dan dengan penghasilan batasan minimum yaitu Rp. 7.000 per hari. Suatu keluarga digolongkan sangat miskin jika pendapatannya hanya mampu memenuhi kebutuhan minimum kalori yang ditetapkan, sedangkan bila pendapatannya selain mampu mencukupi kebutuhan kalorinya juga mampu memenuhi kebutuhan pokok lainnya seperti perumahan, air, sandang, dan pendidikan digolongkan sebagai keluarga miskin (Badan Pusat Statistik, 2009: 4).

Menurut Panjaitan (2000: 7) kemiskinan dapat didefinisikan sebagai standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Kemiskinan seperti itu disebut kemiskinan

relatif. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, pendidikan, dan rasa harga diri mereka tergolong miskin.

Hadiwigeno dan Pakpahan (1993), menyatakan penyebab kemiskinan yaitu:

1. Sumber daya alam (sda)
 - a) Lahan kurang subur.
 - b) Pendayagunaan lahan kurang.
 - c) Degradasi lahan.
2. Teknologi dan unsur pendukungnya
 - a) Aplikasi teknologi rendah.
 - b) Ketersediaan sarana produksi terbatas.
 - c) Hama penyakit.
3. Sumber daya manusia (sdm)
 - a) Tingkat pendidikan rendah.
 - b) Produktivitas tenaga kerja rendah.
 - c) Tingkat kesehatan masyarakat rendah.
 - d) Tradisi yang menghambat.
 - e) Lapangan kerja terbatas.
4. Sarana, prasarana dan kelembagaan
 - a) Daerah terisolir.
 - b) Modal terbatas.
 - c) Irigasi terbatas.
 - d) Pemilikan lahan sempit.

Dalam pelaksanaan program UPPKS yang dimotori oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kriteria yang digunakan untuk menentukan keluarga yang akan memperoleh bantuan pada program ini adalah kriteria yang dikeluarkan oleh BKKBN. Kriteria BKKBN untuk mereka yang tergolong miskin adalah keluarga yang berada dalam kategori pra-KS dan KS I.

Adapun yang dimaksud dengan kategori pra-KS dan KS I adalah :

1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (basic needs). Enam Indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (basic needs), yaitu:

1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.

Pengertian makan adalah makan menurut pengertian dan kebiasaan masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi mereka yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya (staple food), atau seperti makan sagu bagi mereka yang biasa makan sagu dan sebagainya.

2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.

Pengertian pakaian yang berbeda adalah pemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam kegiatan hidup yang berbeda beda. Misalnya pakaian untuk di rumah (untuk tidur atau beristirahat di

rumah) lain dengan pakaian untuk ke sekolah atau untuk bekerja (ke sawah, ke kantor, berjualan dan sebagainya) dan lain pula dengan pakaian untuk bepergian (seperti menghadiri undangan perkawinan, piknik, ke rumah ibadah dan sebagainya).

3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.

Pengertian Rumah yang ditempati keluarga ini adalah keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding dalam kondisi yang layak ditempati, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan.

4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.

Pengertian sarana kesehatan adalah sarana kesehatan modern, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan obat-obatan yang diproduksi secara modern dan telah mendapat izin peredaran dari instansi yang berwenang (Departemen Kesehatan/Badan POM).

5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.

Pengertian Sarana Pelayanan Kontrasepsi adalah sarana atau tempat pelayanan KB, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Dokter Swasta, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan

pelayanan KB dengan alat kontrasepsi modern, seperti IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan dan Pil, kepada pasangan usia subur yang membutuhkan.

6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Pengertian Semua anak umur 7-15 tahun adalah semua anak 7-15 tahun dari keluarga (jika keluarga mempunyai anak 7-15 tahun), yang harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Bersekolah diartikan anak usia 7-15 tahun di keluarga itu terdaftar dan aktif bersekolah setingkat SD/ sederajat SD atau setingkat SLTP/ sederajat SLTP.

2. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI)

Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis" (psychological needs) keluarga. Delapan indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator "kebutuhan psikologis" (psychological needs) keluarga, yaitu:

1. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Pengertian anggota keluarga melaksanakan ibadah adalah kegiatan keluarga untuk melaksanakan ibadah, sesuai dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut oleh masing masing keluarga/anggota keluarga. Ibadah tersebut dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama sama oleh keluarga di rumah, atau di

tempat tempat yang sesuai dengan ditentukan menurut ajaran masing masing agama/kepercayaan.

2. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.

Pengertian makan daging/ikan/telur adalah memakan daging atau ikan atau telur, sebagai lauk pada waktu makan untuk melengkapi keperluan gizi protein. Indikator ini tidak berlaku untuk keluarga vegetarian.

3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.

Pengertian pakaian baru adalah pakaian layak pakai (baru/bekas) yang merupakan tambahan yang telah dimiliki baik dari membeli atau dari pemberian pihak lain, yaitu jenis pakaian yang lazim dipakai sehari hari oleh masyarakat setempat.

4. Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah.

Luas Lantai rumah paling kurang 8 m² adalah keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat atas, maupun tingkat bawah, termasuk bagian dapur, kamar mandi, paviliun, garasi dan gudang yang apabila dibagi dengan jumlah penghuni rumah diperoleh luas ruang tidak kurang dari 8 m².

5. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.

Pengertian Keadaan sehat adalah kondisi kesehatan seseorang dalam keluarga yang berada dalam batas batas normal, sehingga yang bersangkutan tidak harus dirawat di rumah sakit, atau tidak terpaksa harus tinggal di rumah, atau tidak terpaksa absen bekerja/ke sekolah selama jangka waktu lebih dari 4 hari. Dengan demikian anggota keluarga tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukan masing masing di dalam keluarga.

6. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.

Pengertian anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan adalah keluarga yang paling kurang salah seorang anggotanya yang sudah dewasa memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dari sumber penghasilan yang dipandang layak oleh masyarakat, yang dapat memenuhi kebutuhan minimal sehari hari secara terus menerus.

7. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin.

Pengertian anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin adalah anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun dalam keluarga dapat membaca tulisan huruf latin dan sekaligus memahami arti dari kalimat kalimat dalam tulisan tersebut. Indikator ini tidak berlaku bagi keluarga yang tidak mempunyai anggota keluarga berumur 10-60 tahun.

8. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

Pengertian Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi adalah keluarga yang masih berstatus Pasangan Usia Subur dengan jumlah anak dua atau lebih ikut KB dengan menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern, seperti IUD, Pil, Suntikan, Implan, Kondom, MOP dan MOW.

3. Tahapan Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator "kebutuhan pengembangan" (developmental needs) dari keluarga. Lima indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator "kebutuhan pengembangan" (developmental needs), yaitu:

1. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.

Pengertian keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama adalah upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama mereka masing masing. Misalnya mendengarkan pengajian, mendatangkan guru mengaji atau guru agama bagi anak anak, sekolah madrasah bagi anak anak yang beragama Islam atau sekolah minggu bagi anak anak yang beragama Kristen.

2. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.

Pengertian sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang adalah sebagian penghasilan keluarga yang disisihkan untuk ditabung baik berupa uang maupun berupa barang (misalnya dibelikan hewan ternak, sawah, tanah, barang perhiasan, rumah sewaan dan sebagainya). Tabungan berupa barang, apabila diuangkan minimal senilai Rp. 500.000,-

3. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.

Pengertian kebiasaan keluarga makan bersama adalah kebiasaan seluruh anggota keluarga untuk makan bersama sama, sehingga waktu sebelum atau sesudah makan dapat digunakan untuk komunikasi membahas persoalan yang dihadapi dalam satu minggu atau untuk berkomunikasi dan bermusyawarah antar seluruh anggota keluarga.

4. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Pengertian Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal adalah keikutsertaan seluruh atau sebagian dari anggota keluarga dalam kegiatan masyarakat di sekitarnya yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti gotong royong, ronda malam, rapat RT, arisan, pengajian, kegiatan PKK, kegiatan kesenian, olah raga dan sebagainya.

5. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet.

Pengertian Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/ radio/tv/internet adalah tersedianya kesempatan bagi anggota keluarga untuk memperoleh akses informasi baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional, melalui media cetak (seperti surat kabar, majalah, bulletin) atau media elektronik (seperti radio, televisi, internet). Media massa tersebut tidak perlu hanya yang dimiliki atau dibeli sendiri oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi dapat juga yang dipinjamkan atau dimiliki oleh orang/keluarga lain, ataupun yang menjadi milik umum/milik bersama.

4. Tahapan Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (self esteem) keluarga. Dua indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (self esteem), yaitu:

1. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.

Pengertian Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial adalah keluarga yang

memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan sumbangan materiil secara teratur (waktu tertentu) dan sukarela, baik dalam bentuk uang maupun barang, bagi kepentingan masyarakat (seperti untuk anak yatim piatu, rumah ibadah, yayasan pendidikan, rumah jompo, untuk membiayai kegiatan kegiatan di tingkat RT/RW/Dusun, Desa dan sebagainya) dalam hal ini tidak termasuk sumbangan wajib.

2. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.

Pengertian ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan bantuan tenaga, pikiran dan moral secara terus menerus untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dengan menjadi pengurus pada berbagai organisasi/kepanitiaan (seperti pengurus pada yayasan, organisasi adat, kesenian, olah raga, keagamaan, kepemudaan, institusi masyarakat, pengurus RT/RW, LKMD/LMD dan sebagainya).

5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.

3. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Pelaksanaan sebuah program terkait dengan implementasi sebuah kebijakan, istilah kebijakan dewasa ini telah digunakan untuk menjelaskan hal yang beragam. Menurut Wahab (2001: 22), penggunaan istilah kebijakan dapat dikategorikan dalam sepuluh kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan sebagai label bagi suatu bidang kegiatan tertentu. Dalam konteks ini, kata kebijakan digunakan untuk menjelaskan bidang kegiatan pemerintahan atau bidang kegiatan di mana pemerintah terlibat di dalamnya, seperti kebijakan ekonomi atau kebijakan luar negeri.
2. Kebijakan sebagai ekspresi mengenai tujuan umum/keadaan yang dikehendaki. Di sini kebijakan digunakan untuk menyatakan kehendak dan kondisi yang dituju, seperti pernyataan tentang tujuan pembangunan di bidang SDM untuk mewujudkan aparatur yang bersih.
3. Kebijakan sebagai bidang proposal tertentu. Dalam konteks ini, kebijakan lebih berupa proposal, seperti misalnya usulan RUU di Bidang Keamanan dan Pertahanan atau RRU di Bidang Kepegawaian.
4. Kebijakan sebagai sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Sebagai contoh adalah keputusan untuk melakukan perombakan terhadap suatu sistem administrasi Negara.
5. Kebijakan sebagai sebuah pengesahan formal. Di sini kebijakan tidak lagi dianggap sebagai usulan, namun telah sebagai keputusan yang sah. Sebagai contohnya adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan keputusan sah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

6. Kebijakan sebagai sebuah program. Yang dimaksud dengan kebijakan di sini adalah program yang akan dilaksanakan. Sebagai contoh adalah program pemberdayaan masyarakat miskin melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS).

7. Kebijakan sebagai *out put* atau apa yang ingin dihasilkan. Yang dimaksud dengan kebijakan di sini adalah *out put* yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan, seperti misalnya pelayanan yang murah dan cepat atau pegawai negeri sipil yang profesional.

8. Kebijakan sebagai *out come*. Kebijakan di sini digunakan untuk menyatakan dampak yang diharapkan dari suatu kegiatan, seperti misalnya pemerintahan yang efektif dan efisien.

9. Kebijakan sebagai teori atau model. Kebijakan di sini menggambarkan model atau suatu keadaan, dengan asumsi yang digunakan. Sebagai contoh, kalau pajak di naikkan $x\%$ maka *revenue* diperkirakan akan naik $y\%$ atau kalau x dilakukan maka yang terjadi adalah y .

10. Kebijakan sebagai proses atau tahapan yang perlu dilaksanakan. Kebijakan di sini menggambarkan suatu proses atau tahapan yang akan dilalui untuk mencapai hasil yang diharapkan.

a. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program

Mustopadidjadja (2003: 37) menyatakan bahwa berhasil atau gagalnya suatu kebijakan tergantung pada beberapa kondisi yaitu a). Ketepatan pelaksanaan kebijakan, bagaimana sebuah kebijakan diimplementasikan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Studi implementasi merupakan suatu kajian

mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. b). Konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaannya, c). Terjadi tidaknya perkembangan di luar perkiraan.

b. Kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin

Pada setiap kebijakan publik yang telah ditetapkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengalami adanya keterbatasan dalam kegiatan operasionalnya sebagai satu sumber daya yang terbatas atau dapat disebut kendala.

Menurut Hansen dalam Setia Budi (2005: 27), jenis kendala berdasarkan asalnya adalah sebagai berikut :

- 1) Kendala internal, merupakan faktor -faktor yang membatasi suatu instansi yang berasal dari dalam berupa kendala sumber daya. Dalam penelitian ini kendala berupa kurang profesionalnya kinerja tim pelaksana kegiatan dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Kendala eksternal, merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar instansi. Kendala dari luar dapat berupa pengaruh lingkungan tempat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin tersebut.

c. Upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin

Kartasasmita (1995: 4) mengatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat miskin dapat dilakukan melalui tiga tahap yaitu :

- 1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses ke berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang.
- 3) Memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi semakin lemah, dan menciptakan kebersamaan serta kemitraan antara yang sudah maju dan yang belum maju/berkembang. Secara khusus perhatian harus diberikan dengan keberpihakan melalui pembangunan ekonomi rakyat, yaitu ekonomi usaha kecil, agar tidak tertinggal jauh, melainkan dapat memanfaatkan momentum globalisasi bagi perkembangannya.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan masyarakat miskin lebih menekankan kepada aspek kemandirian dengan memberikan bantuan dari pemerintah guna meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

4. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

a. Pengertian Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera yang beranggotakan, baik ibuibu/ wanita dari keluarga prasejahtera (Pra KS), Keluarga Sejahtera I, maupun keluarga lain yang tahap kesejahteraannya lebih tinggi, baik yang belum, sedang, maupun purnapeserta KB. Cikal bakal UPPKS dimulai sejak 1976 melalui program "*Community Incentive Project*" (CIP). Program ini selanjutnya dikembangkan tahun 1979 melalui pendekatan kelompok dengan penyediaan modal kerja dari berbagai sumber dana bagi kelompok-kelompok akseptor KB, dan kelompok ini dikenal dengan sebutan Usaha Peingkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Awal tahun 1990 sesuai perkembangan program, UPPKA diubah menjadi UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dengan cakupan yang lebih luas yaitu tidak hanya terbatas pada keluarga akseptor KB.

b. Tujuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

Tujuan umum dari kelompok UPPKS adalah untuk memberdayakan ibu-ibu/wanita di bidang ekonomi sebagai upaya peningkatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka membangun kemandirian dan ketahanan keluarga serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Secara khusus tujuan kelompok UPPKS adalah :

1. meningkatkan pemberdayaan keluarga dibidang ekonomi.
2. melatih keluarga, khususnya wanita untuk melakukan kegiatan wirausaha.
3. meningkatkan dinamika kehidupan keluarga.
4. meningkatkan peran serta keluarga dalam pelaksanaan pembangunan di lingkungannya.
5. meningkatkan kemandirian dan ketahanan keluarga.
6. meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan.

c. Sasaran Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

Sasaran langsung yang dituju pada program ini adalah kaum wanita yang termasuk kategori Keluarga pra Keluarga Sejahtera (pra-KS), Sejahtera I, dan keluarga lain yang tingkat kesejahteraannya sudah lebih tinggi daripada yang akan dan sedang melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif. Sasaran tidak langsung dari kegiatan ini antara lain adalah kader pembangunan di tingkat desa, tokoh masyarakat, PLKB, dan pemberi pinjaman modal.

Para keluarga dari KPS tersebut bersama-sama dengan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) membentuk kelompok yang terdiri dari 10 sampai 20 anggota, dan memilih kepengurusan kelompok yang minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Pentingnya peranan keluarga dari KS III Plus dalam kelompok ini dimaksudkan dapat membimbing para keluarga dari KPS Plus. Biasanya pembentukan kelompok ini difasilitasi oleh PPKB-RW (Pembantu

Pembina KB tingkat RW) selaku kader dan PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) sebagai pendamping kelompok.

- d. Bentuk program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang dikembangkan oleh Pembina kelompok UPPKS dan mitra usaha

Kelompok UPPKS dibina secara langsung oleh PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) yang dibantu oleh PPKB-RW. Di beberapa kelurahan telah ada PKB yang telah menerima pelatihan dan bertindak sebagai Pendamping Kelompok UPPKS. Dalam menjalankan tugasnya, Pembina Kelompok ini diantaranya berperan dalam melakukan berbagai kemitraan dalam usaha diharapkan dapat usaha peningkatan kuantitas dan kualitas kelompok UPPKS.

Adapun bentuk program UPPKS tersebut adalah:

- a. Modal

Modal menjadi salah satu permasalahan utama bagi kelompok UPPKS yang ingin mengembangkan usahanya. Modal yang diberikan kepada kelompok UPPKS diberikan berbentuk pinjaman lunak tanpa membutuhkan jaminan untuk memperolehnya, dari pinjaman-pinjaman yang telah dikembalikan kemudian diputarkan lagi kepada kelompok-kelompok baru yang akan melakukan usaha dalam kelompok UPPKS.

Adapun sumber modal berasal dari :

- 1) Iuran simpanan pokok/ wajib, sukrela, sumbangan, jasa (dapat dipergunakan sebagai modal usaha anggota).

- 2) Tabungan/ simpanan, merupakan penyesuaian sebagian kebutuhan anggota maupun kelompok (menjadi sumber modal yang dapat dipergunakan sebagai modal usaha).
- 3) Pinjaman yang dapat diperoleh dari berbagai institusi (datangi institusi yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur yang harus ditempuh) seperti : BANK, BUMN, Swasta dan sumber-sumber lain.
- 4) Sisa hasil usaha.

b. Produksi

Dalam proses produksi keterampilan memegang posisi yang sangat strategis dalam suatu usaha. Dalam rangka peningkatan hasil produksi kelompok UPPKS, berbagai kegiatan dilakukan antara lain :

- a) Melakukan orientasi bagi anggota kelompok UPPKS.
- b) Melakukan magang dalam pengembangan usaha kelompok.
- c) Melakukan pembinaan secara berkelanjutan unsur terkait.
- d) Melakukan pertemuan rutin dengan kelompok UPPKS baik tingkat kota maupun kecamatan.
- e) Melakukan kerja sama dengan mitra usaha dalam hal pembinaan produksi kelompok.

Teknologi yang digunakan oleh UPPKS umumnya masih sederhana yang mengakibatkan kualitas produk masih dibawah standar. Mitra usaha dapat memberikan teknologi yang lebih maju dalam proses produksi sehingga pasokan produk bagi Mitra usaha dapat sesuai dengan yang diinginkan.

c. Promosi dan Pemasaran

Arti promosi sebagai sarana utama dalam peningkatan jangkauan pemasaran dan meningkatkan pangsa pasar, belum dipahami secara baik oleh kelompok UPPKS. Jangkauan pemasaran produk UPPKS juga masih terbatas dan memerlukan bantuan perluasan jangkauan pemasaran, baik melalui pameran, pasokan ke toko, super-market atau tempat-tempat strategis lainnya, atau melalui penyediaan counter-counter khusus bagi kelompok UPPKS. Pemahaman tentang promosi dan pemasaran tampaknya harus ditanamkan terlebih dahulu kepada kelompok UPPKS.

d. Manajemen Kelompok

Rendahnya pendidikan para anggota kelompok UPPKS mengakibatkan rendahnya kemampuan mereka dalam mengelola kelompok dan usaha. Bimbingan dan pelatihan dari mitra usaha sangat dibutuhkan, dan mitra usaha dapat memperoleh imbalan sesuai dengan kesepakatan. Imbalan ini tidak mesti dalam bentuk dana, tetapi bisa dalam bentuk lain misalnya komitmen untuk memasok kebutuhan bahan baku atau produk sesuai standar mitra usaha, atau komitmen untuk menggunakan pola kerja yang diterapkan oleh mitra usaha. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki manajemen kelompok tersebut yaitu :

- a) Menfungsikan pengurus kelompok yang telah ada seperti sekretaris, bendahara dan keanggotaan lainnya.
- b) Pembentukan struktur organisasi kelompok.
- c) Pembenahan bahan baku kelompok.

- d) Kelengkapan dan keteraturan administrasi seperti buku harian, buku anggota, serta buku laporan pencatatan administrasi.

B. Kerangka Konseptual

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah kegiatan usaha ekonomi produktif keluarga, terutama kaum ibu dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan keluarga, namun dalam pelaksanaannya masih menemui beberapa kendala, baik kendala yang bersifat internal dan eksternal, adapun kendala tersebut diantaranya adalah belum sepenuhnya masyarakat miskin yang ikut serta kedalam program UPPKS hal ini diantaranya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kota Padang Panjang.

Berangkat dari beberapa masalah yang ada diperlukan beberapa upaya-upaya penanggulangan dalam memecahkan masalah dalam pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) itu, agar dapat memenuhi hasil yang akan dicapai dengan adanya program tersebut.

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir dalam menggambarkan hubungan konsep yang akan diteliti. Berangkat dari latar belakang masalah dan kajian teoritis, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat dalam diagram berikut :

Bagan 2.1

Kerangka Konseptual

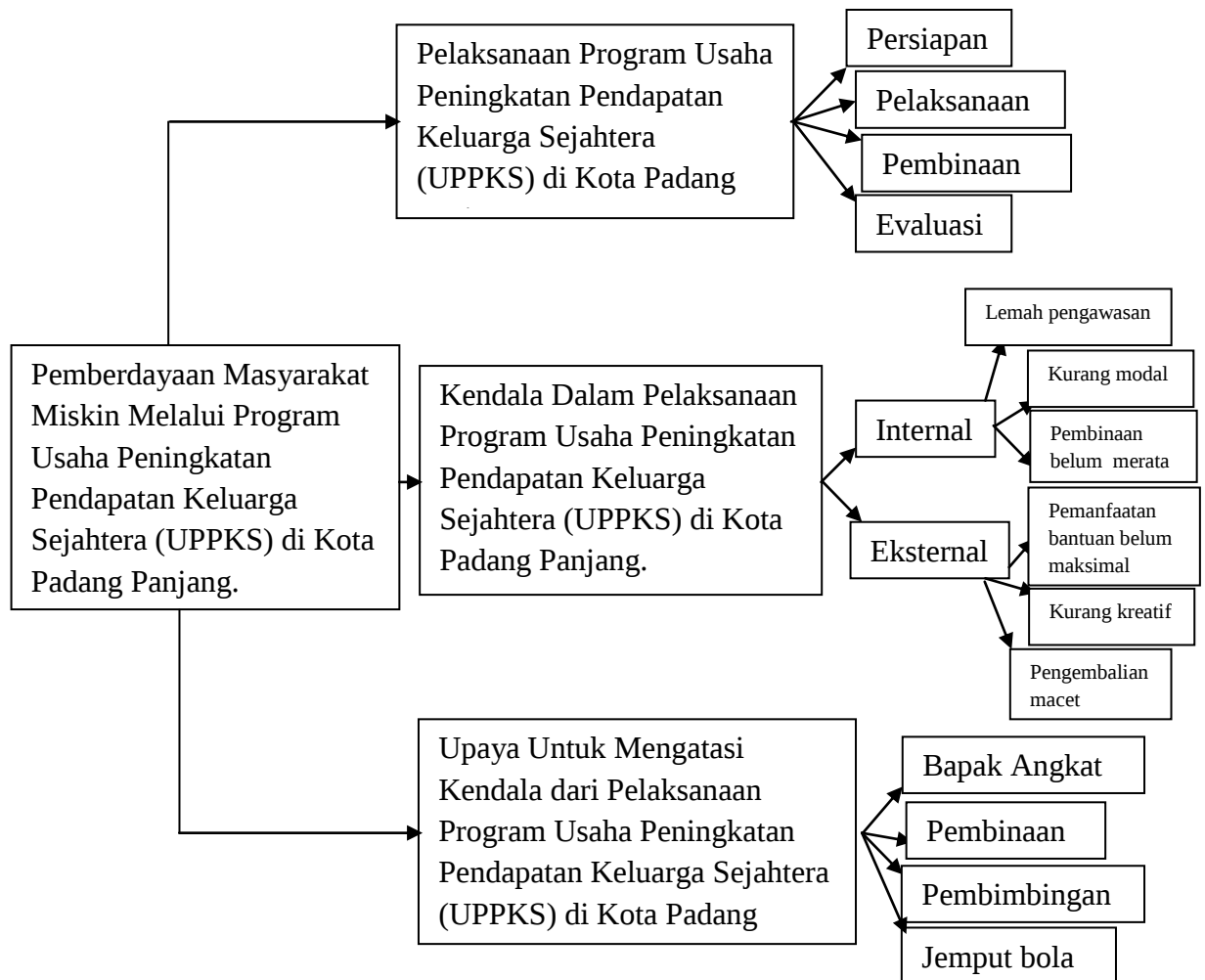


Diagram diatas menggambarkan bahwa dalam penelitian ini yang akan dilihat adalah pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Padang Panjang, mulai dari pelaksanaan program, kendala yang ditemui baik kendala yang bersifat internal dan eksternal serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dari program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) di Kota Padang Panjang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diungkapkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) diberikan kepada masyarakat miskin yang dikhususkan kepada ibu-ibu/wanita berupa bantuan modal usaha dalam rangka pengembangan usaha yang dijalankan dan sebagai modal bagi anggotanya tersebut untuk membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatannya. Walaupun pelaksanaan program UPPKS telah sesuai dengan prosedur yang ada namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini tampak pada beberapa kelompok UPPKS, seperti pada kelompok UPPKS Melati I Pasar Usang yang mengaku belum mampu meningkatkan kesejahteraan anggota kelompoknya disebabkan jumlah bantuan modal yang diberikan kecil selain itu kurangnya kreatifitas dan inovasi dalam mencari dan memanfaatkan dana pinjaman yang ada juga membuat usaha yang dilakukan kelompok tidak berkembang.
2. Pelaksanaan program Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera di Kota Padang Panjang sudah terlaksana, namun belum optimal, seperti lemahnya pengawasan terhadap program, kurangnya modal yang diberikan pemerintah, dan pembinaan yang belum merata. Selanjutnya mekanisme

pelaksanaan program UPPKS dimulai dari tahap persiapan sampai kepada pelaksanaan. Tahap persiapan dimulai dari pengelolaan kelompok dan pengelolaan administrasi dan keuangan serta pengelolaan usaha kelompok, setelah kelompok UPPKS melakukan tahap persiapan berlanjut kepada pelaksanaan yang dimulai dari pembentukan kelompok, pembuatan proposal usaha, membangun usaha kelompok, serta mengembangkan kelompok. Penyaluran dana program UPPKS diserahkan melalui koperasi AKU yang berkisar antara Rp. 2.500.000,- sampai Rp. 5.000.000,- untuk peminjaman pertama dengan bunga 0,6% perbulan, jangka waktu peminjaman ini berkisar antara 1-2 tahun. Perkembangan program UPPKS yang ada di kota Padang Panjang dari bulan ke bulan mengalami peningkatan yang tercatat dari 25 kelompok yang ada sudah berkembang menjadi 32 kelompok UPPKS pada saat sekarang.

3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program UPPKS di Kota Padang Panjang dapat dikategorikan kedalam dua bentuk yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal adalah (1)lemahnya pengawasan terhadap program. (2)kurangnya modal yang bersumber dari pemerintah. (3)pembinaan yang belum merata. Sedangkan kendala eksternal yaitu (1)pemanfaatan dana bantuan yang belum maksimal. (2)kurangnya kreatifitas dan inovasi beberapa kelompok dalam mencari dan memanfaatkan sumber dana. (3)keterlambatan pengembalian pinjaman.

4. Untuk mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan program UPPKS antara lain mengikut sertakan keluarga sejahtera III bertindak sebagai bapak angkat dalam keompok, melakukan pembinaan, dan kendala yang bersumber dari peserta program dilakukan upaya seperti pembimbingan mengenai tujuan sebenarnya program UPPKS ini, melakukan sistem jemput bola terhadap anggota yang macet dalam pembayaran.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat miskin melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera di Kota Padang Panjang belum maksimal. Untuk memaksimalkan hal tersebut, peneliti menyarankan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelaksanaan program dengan cara :

1. Meperkuat pengawasan yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok UPPKS yang ada, sehingga pelaksanaan yang dilakukan dapat berjalan sebagaimana mestinya
2. Memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang cara-cara pemanfaatan dan pencarian dana usaha yang lain secara baik dan benar.
3. Pemerataan pembinaan terhadap setiap kelompok UPPKS yang ada, supaya dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan penghasilannya.
4. Memberikan sanksi yang tegas terhadap kelompok yang melakukan pengembalian menunggak, hal ini bertujuan supaya dana tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk pengembangan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Penduduk Miskin (PoorPopulation)*. Berita Resmi Statistis Penduduk Miskin No.04/Th.II/July. Jakarta : CBS.
- Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang. 2012. *Padang Panjang dalam angka 2011/2012*. Padang Panjang : BPS Kota Padang Panjang.
- BKKBN. 2005. “*Kelompok UPPKS sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Keluarga*”. Jakarta: BKKBN.
- BKKBN. 2011. “*Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Kelompok UPPKS*”. Padang : BKKBN
- Budi Winarno. 2002. *Kebijakan Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Persindo.
- Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metode Logis Kearah Pembangunan Model Aplikasi*. Jakarta : Rajawali
- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Ginjar Kartasmita. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat : sebuah tinjauan administrasi*. Malang : Unibraw Press.
- Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang. 2009. *Profil UPPKS kota Padang Panjang*. Padang Panjang : Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang.
- Lexy J Muleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjadja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik ; formulasi, implementasi dan evaluasi kinerja*. Jakarta : Perum Percetakan Negara RI.

Ony S Priyono dkk. 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta : Center for Strategic and International Studies.

Roesmidi dan Risyanti. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang : Alqaprint Jatinangor.

Soerjono Soekanto. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.

Sugiarti. 2003. *Pembangunan Dalam Perspektif Gender*. Malang : UMM.

Sugiyono. 2008. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Syarif Makmur. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Internet

www.bkkbn.go.id/ diakses pada tanggal 12 Desember 2012.

Setia Budi. 2005. *Persepsi anggota tentang para pemimpin kelompok pada masyarakat miskin kota di kecamatan bogor timur, kota bogor*. Program studi ilmu penyuluhan pambangunan pasca sarjana institute pertanian bogor (<http://www.damandri.co.id>), diakses tanggal 2 Januari 2013

Peraturan perundang-undangan

UU No.10 Tahun 1992. *Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*.

Inpres Nomor 3 Tahun 1996. *Tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera*.

Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2008. *Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang*.